

RENCANA

KERJA 2024



**Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Tana
Tidung**

Eks Rumah Sakit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-NYA, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 dapat tersusun.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung sebagai suatu instrument kebijakan Dinas. Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2024, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standar yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja.

Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Mengetahui,
Plt, Kepala Dinas Komunikasi
Dan Informatika

Uus Rusmanda,A.KS.,M.HP

197007161992011001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Adalah Perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya, dan merupakan satu dokumen Rencana resmi yang di persyaratkan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah tahunan pada umumnya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 yang merupakan indikasi Tahun ke 4 (Empat) Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja menerjemahkan perencanaan startegis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra OPD kedalam Rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjambatani sinkronisasi, harmonisasi. Rencana kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 akan dibahas organisasi perangkat daerah yang diselenggarakan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026. Rencana Kerja digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas daerah Kabupaten Tana Tidung.



Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung merupakan kumpulan/ himpunan penjabaran pedoman dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan (Renja) memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur untuk standar yang digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.

Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota

Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk didalamnya adalah Kabupaten Tana Tidung, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial adalah penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Rancangan Awal Rencana Kerja memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja



Perangkat Daerah yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada;

3. Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan acuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan kebijakan umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program*, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;

4. Rancangan Awal Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan;

5. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai dokumen acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 sekaligus instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum penyusunan Ranwal Renja 2024 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224); Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka



- Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

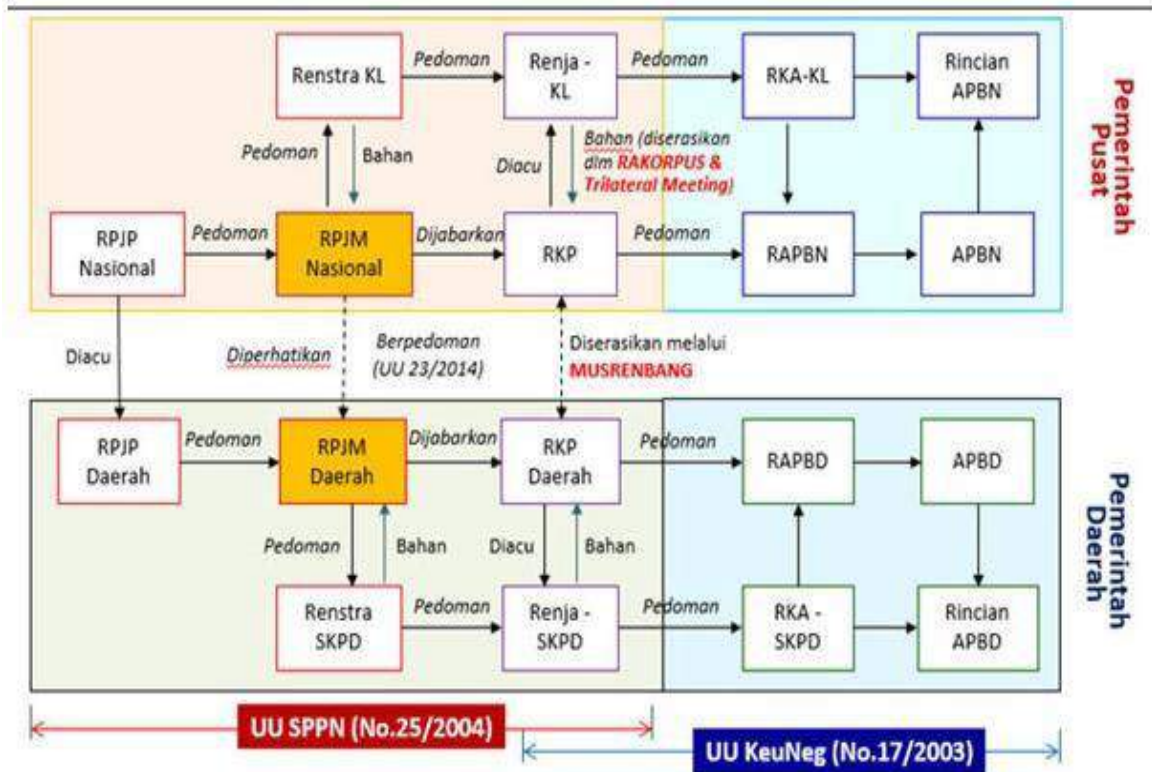
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan



dalam rancangan awal rencana kerja daerah yang dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja PD) pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD)

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunann tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD, secara umum hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1.3

Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan seperti yang ditampilkan pada gambar 1.3 diatas telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem



Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain kedudukannya yang strategis, RKPD juga merupakan dokumen perencanaan yang komperhensif, karena disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, SDG's/TPB, RKP serta SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud : Untuk mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Dalam urusan pengembangan e-government, pengembangan komunikasi media dan data/informasi/statistik, pengelolaan persandian serta lintas urusan dan lintas pemerintah daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung
2. Tujuan
- a. Sebagai dokumen perencanaan rancangan awal tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024
 - b. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024
 - c. sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.5 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung disusun dengan sistematika sebagai berikut:



1. Buku 1 , Narasi Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal RENJA 2024).

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 dan realisasi Rencana Kerja Tahun 2022, permasalahan pembangunan daerah dan isu startegis pembangunan daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi,dan Informatika, Kabupaten Tana Tidung

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KARATERISTIK WILAYAH

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kabupaten ini kemudia disahkan Oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Yidung resmi menjadi kabupaten ke-10 atau daerah otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Pejabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi sala satu Kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km² dengan ibukota kabupaten terletak di Desa Tideng pale Kecamatan Sesayap, yang terdiri dari 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan kecamatan Tana Lia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu melakukan pemekaran wilayah kecamatan. Maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2012, wilayah kecamatan Kabupaten Tana Tidung bertambah menjadi 5 wilayah kecamatan. Sehingga wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamaran dan 32 Desa yaitu Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Betayau, dan Kecamatan Muruk Rian. Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Nunukan
Sebelah Timur	:	Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Bulungan
Sebelah Barat	:	Kabupaten Malinau



Wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamatan atau 32 desa yang terdiri sebagai berikut:

1. Kecamatan Sesayap, dengan luas wilayah 1.016,92 Km² membawahi 7 desa, yaitu Desa Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sebidai, Sedulun, Tideng Pale Timur, Gunawan dan Sebawang.
2. Kecamatan Sesayap Hilir, dengan luas wilayah 1.317,53 Km² membawahi 8 desa, yaitu Desa Sesayap, Sengkong, Bebatu, Badan Bikis, Sepala Dalung, Seludau, Menjelutung dan Sesayap Selor.
3. Kecamatan Tana Lia, dengan luas wilayah 877,86 Km² membawahi 5 desa, yaitu Desa Tanah Merah, Tengku Dacing, Sambungan, Tanah Merah Barat, dan Sambungan Selatan.
4. Kecamatan Betayau, dengan luas wilayah 1.007,65 Km² membawahi 6 desa, yaitu Desa Buong Baru, Bebakung, Kujau, Mendupo, Maning dan Periuk.
5. Kecamatan Muruk Rian, dengan luas wilayah 608,62 Km² membawahi 6 desa, yaitu Desa Seputuk, Rian, Belayan Ari, Rian Rayo, Kapuak dan Sapari

Untuk dapat melihat lebih jelas pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Tana Tidung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel II.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung

No Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa
1 Sesayap	1.016,92	7
2 Sesayap Hilir	1.317,53	8
3 Tana Lia	877,86	5
4 Betayau	1.007,65	6
5 Muruk Rian	608,62	6
Jumlah	4.828,58	32

Sumber : Perda No. 5 Tahun 2011 dan Perda No. 10 Tahun 2012

Gambar II.1

Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung



Sumber: Teknokrat RPJMD Kabupaten Tana Tidung, Tahun 2020

2.2 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sebagai daerah yang menjadi beberapa titik daerah terpencil, pemerataan jaringan komunikasi menjadi salah satu solusi dalam memberikan informasi bagi masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyebaran informasi agar daerah yang belum memiliki konektivitas wilayah yang baik mampu memahami perkembangan pembangunan yang terjadi. Terlihat bahwa persentase penduduk yang telah menggunakan HP/Telepon Nirkabel bahwa persentase penduduk yang telah menggunakan HP/Telepon Nirkabel ataupun Komputer cukup tinggi, khususnya pada masyarakat berpendidikan SMP ke atas dimana dari masyarakat tersebut juga memiliki capaian penggunaan akses internet mencapai 82,53 persen masyarakat berpendidikan SMP keatas dan 45-91 persen masyarakat berpendidikan SD ke bawah.

2.3 TELAAHAN TATA RUANG WILAYAH

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukkan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. Dengan demikian maka Dinas Komunikasi dan



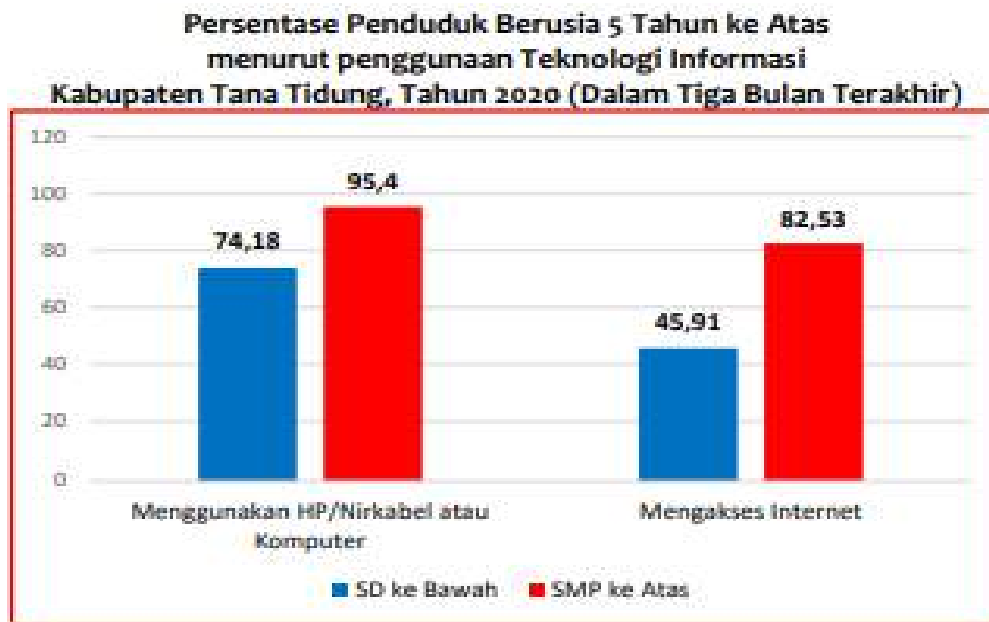
Informatika dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung maka dalam pelaksanaannya tidak berpotensi melakukan pelanggaran dan keterkaitan/ implikasi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tana Tidung. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang terdiri atas:

1. Kebijakan dan startegis struktur ruang;
2. Kebijakan dan startegi pola ruang;

Sesuai dengan RT/RW pengembangan jaringan telekomunikasi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan jaringan diseluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung untuk mendukung integrasi
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penyediaan jaringan
3. Tersedianya regulasi yang tepat sehingga semua akan berjalan dengan baik



Sumber: BPS KTT, Tahun 2020



2.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika beralamat di Jalan Perintis RT VII Eks Rumah Sakit Lama, Desa Tideng Pale terletak membujur pada posisi 1160 42' 50" – 1170 49' 50" Bujur Timur dan 30 12' 02" – 30 46' 41" Lintang Utara. Batas Wilayah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, Batas Wilayah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan (P. Bunyu), dan Kota Tarakan, Batas Wilayah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Batas Wilayah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Malinau.

Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah 4.828,58 km², Kabupaten Tana Tidung memiliki kelas ketinggian didominasi 7 - 25 m di atas permukaan laut dan hanya sebagian kecil yang memiliki ketinggian 100 - 500m di atas permukaan laut (0,01%). Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Dengan kondisi geografis tersebut Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi dibidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pertambangan dan Migas, Kehutanan, Industri dan Pariwisata. Selain kondisi geografis perlu juga diperhatikan aspek demografi dimana penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung 21.891 Jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 7,3%. Relatif tingginya rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tana Tidung ini disebabkan karena Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah otonomi baru, sehingga meningkatnya migrasi penduduk ke wilayah Kabupaten Tana Tidung.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung. Dalam kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas;



- c. Bidang Komunikasi dan Kehumasan
- d. Bidang Teknologi dan Informatika;
- e. Bidang Statistik dan Persandian
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kehumasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kehumasan menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan kehumasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan ditugaskan kepada daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan, program, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;



- e. melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- g. melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang;
- i. administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- m. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, Laporan Kinerja dinas dan surat menyurat;
- n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- o. mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
- p. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- q. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) , Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- r. mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja (PK) dan penilaian / pengukuran kinerja individu
- s. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) dinas dan individu;
- t. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKP dan LP2P dilingkungan dinas;
- u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
- v. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
- w. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;



y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, pimpinan dan pembinaan ketatausahaan, kearsipan, urusan administrasi aparatur sipil negara, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara

Sub bagian Perencanaan ,Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan, dan penyusunan RENSTRA dan RENJA, Rencana Kerja kegiatan dan anggaran, penyusunan rencana kinerja tahunan, perjanjian kerja organisasi , laporan kinerja dan keuangan, pengelolaan keuangan, penyusunan LAKIP, LKPI,LPPD, Penyelenggara sistem intern.

2) Bidang Komunikasi dan Kehumasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Kehumasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan bimbingan teknis dibidang komunikasi dan kehumasan

Bidang Komunikasi dan Kehumasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Komunikasi dan Kehumasan sesuai rencana kerja dinas;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan kehumasan pemerintah daerah;
- c. melaksanakan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan kehumasan pemerintah daerah;
- d. mengelola informasi publik pemerintah daerah;
- e. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasional usaha komunikasi;
- f. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan jasa usaha komunikasi dan informasi;
- g. melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemda maupun Non Pemda;



- h. melaksanakan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan media massa;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban, pengawasan, pengendalian, pembinaan penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- j. melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran Publik (LPPL) serta pemungutan retribusi;
- k. melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan

3) Bidang Teknologi Informatika

Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang aplikasi informatika pemerintah daerah. Bidang Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Teknologi Informatika sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang e-Government;
- c. melaksanakan kebijakan teknis dibidang e-Government
- d. melaksanakan pelayanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK;
- e. melaksanakan pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- f. melaksanakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah;



- i. menyiapkan layanan keamanan informasi e-Government
- j. menyelenggarakan dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan dan aplikasi SITEL;
- k. penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*;
- l. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang e-Government;
- m. menyelenggarakan, pengelolaan, pengolahan dan pendayagunaan Teknologi Informasi;
- n. melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

4) Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang statistik dan bidang Persandian. Untuk melaksanakan tugas bidang statistik dan persandian mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- c. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- d. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- e. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- f. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data bidang persandian dan statistik;
- g. melaksanakan persandian dan pengamanan terhadap alat-alat persandian;
- h. mengkoordinasikan pengumpulan data dan pelaksanaan survey sesuai kebutuhan pemerintah daerah;
- i. melaksanakan analisis dan evaluasi/ penilaian data atas hasil pelaksanaan survey;



- j. mengkoordinasikan pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan
- k. persandian;
- l. memberikan dukungan kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan statistik dan persandian;
- n. penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum dibidang Statistik dan Persandian;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan Fungsinya;

Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, terdiri atas:

1. Seksi Statistik dan
2. Seksi Persandian.

Seksi Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Statistik dan Persandian

Seksi Statistik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi Statistik sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- d. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
- e. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM
- f. melaksanakan survey Statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
- g. menyusun dan melaksanakan dokumentasi statistik hasil-hasil pembangunan daerah;



- h. menyusun dan mengembangkan visualisasi statistik pembangunan daerah;
- i. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
- j. melaksanakan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bidang Statistik dan Persandian. Seksi Persandian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran seksi persandian sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis terkait keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
- c. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras sandi dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- e. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan sandi;



- h. mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- i. mengelola proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pengiriman penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- k. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- l. melaksanakan peningkatan kesadaran pengaman informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan / atau seminar;
- m. mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan atau seminar;
- n. melaksanakan pengadaan , penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- o. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- p. menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- q. menyusun rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- r. menyusun rencana kebutuhan unsur pengelolaan dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- s. merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten;
- t. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/ aset/ fasilitas/ instalasi penting/ vital/ kritis

5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas meliputi:

- 1) Pada Badan dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-



Undangan yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala Dinas

3) Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dengan keahlian dan kebutuhan.

Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung memiliki Visi dan Misi untuk mendukung tercapainya program-program dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan misi 2 dan misi 6:

Misi ke-2 (Kedua) yakni “Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah”. Tujuan dari pelaksanaan misi ke-2 adalah “Menyediakan Infrastruktur pembangunan yang berkualitas menuju KTT TERANG dan KTT ADA”. Dalam upaya mewujudkan dalam bidang komunikasi dan informatika, maka sasaran yang harus dipenuhi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sasaran kedua yaitu: “Meningkatkan jaringan listrik/ penerangan dan kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi sebagai wujud KTT TERANG”.

Misi Ke-6 (Keenam) yakni “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan dari pelaksanaan misi ke-6 adalah “Meningkatkan Kualitas layanan Publik sebagai wujud KTT MELAYANI dan KTT DIGITAL dengan fokus pada pelayanan terkait dengan birokrasi dan pekerjaan yang berbasis teknologi informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

2.6 ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung yaitu:

1. Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat akan semakin kritis dan berani untuk



menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, persoalannya adalah hingga saat ini akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan masih begitu sulit dan sangat terbatas. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government) melalui kebijakan keterbukaan informasi publik berpotensi mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh besarnya komitmen pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya peningkatan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan informasi publik sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik belum optimal dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. Website Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan seluruh subdomain website SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah belum digunakan secara optimal bahkan tidak digunakan yang seharusnya sebagai sarana untuk mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Disamping itu, minimnya dukungan anggaran dan terbatasnya jangkauan

sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan. Disisi lain, revolusi industri 4.0 diperlukan masyarakat dengan budaya literasi yang tinggi untuuk menghadapi tantangan kemajuan teknologi, literasi dinilai dapat dinilai secara realistis untuk menghadapi tantangan revolusi industri yang bersifat dinamis ini. Budaya gemar membaca yang tinggi dapat mencerminkan kemudahan akses dan awarness dalam memperoleh informasi agar masyarakat dapat terhindar dari berita hoax. Paradigma baru komunikasi publik ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus difasilitasi agar menjadi agen penyebarluasan informasi yang tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi publik yang tersebar di masyarakat. Berbagai bentuk fasilitasi kelompok-kelompok komunikasi



publik di masyarakat mutlak dilakukan agar proses pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kelompok -kelompok komunikasi publik dimaksud dapat digolongkan dalam berbagai bentuk seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Media Massa. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung belum dapat mengoptimalkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat sehingga masih belum optimal kinerjanya dan dinilai rendah.

2. Belum Optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyebab daripada belum optimalnya Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tana Tidung, diantaranya: 1) Belum terbentuknya dewan pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan; 2) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang penyelenggaraan SPBE; 3) Belum tersedianya pedoman penatalaksanaan tata kelola TIK; 4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pembangunan jangka menengah mendatang. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan pelayanan pemerintah kabupaten sebagai salah satu 61 Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika sasaran pokoknya. Apalagi ditingkat nasional juga diagendakan untuk membangun “Peningkatan transformasi pelayanan publik”, maka teaptlah isu ini menjadi perhatian dan ditempatkan sebagai isu strategis bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Tuntutan Masyarakat Transparansi Internasional juga memuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan keefektifan. Semua ini akan terjawab dengan lebih baik jika permasalahan SDM pemerintahan baik secara kuantitas dan kualitas berikut sarana dan prasarannya memadai dapat terselesaikan. Isu strategis ini merupakan pengerucutan dari permasalahan tersebut diatas: kecukupan SDM (kuantitas, kualitas dan sebarannya), sarana dan prasarana (tempat pelayanan, jaringan pelayanan, dan instrumen lainnya), serta metode pelayanan masyarakat, serta permasalahan lain yang mendukung terciptannya pemerintahan yang baik bagi Kabupaten Tana Tidung.



2.7 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022



Tabel 2.7

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Perubahan		Realisasi s.d Triwulan IV	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
2						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat atau Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor	100%	Rp6.021.129.536,-	80%	Rp5.958.611.488,-
2	01					PERENCANAAN					
2	16	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atau Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor	100%	Rp6.021.129.536,-	80%	Rp5.958.611.488,-
2	16	01	2.01			Perencanaan, Penggabungan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp68.297.400,-	10 Dokumen	Rp66.252.070,-
2	16	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Disusun	10 Dokumen	Rp68.297.400,-	10 Dokumen	Rp66.252.070,-
2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Terpenuhi Kesejahteraanya Dalam Setahun	100%	Rp4.719.303.205,-	80%	Rp4.704.894.765,-
2	16	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan nya Dalam Satu Tahun	12 Bulan	Rp4.518.463.205,-	12 Bulan	Rp4.504.734.765,-
2	16	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Menerima Honorarium Dalam Satu Tahun	12 Bulan	Rp200.840.000,-	12 Bulan	Rp200.160.000,-
2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang Terpenuhi	100%	Rp0,00-	0%	Rp0,00,-



No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Perubahan		Realisasi s.d Triwulan IV	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
						Perangkat Daerah	Kesejahteraanya Dalam Satu Tahun				
	2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Dalam Satu Tahun	2 Orang	Rp0,00,-	Tidak Ada	Rp0,00,-
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan ASN Diskominfo Terhadap Pelayanan Kantor1	100%	Rp707.190.171,-	80%	Rp673.039.053,-
	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Diadakan	8 Unit	Rp86.074.276,-	8 Unit	Rp81.561.000,-
	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Fasilitas Bahan Logistik Kantor yang Diadakan Dalam Satu Tahun	12 Bulan	Rp231.429.128,-	8 Bulan	Rp210.559.268,-
	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Unit	Rp15.137.280,-	2 Unit	Rp15.110.000,-
	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	1 Kegiatan	Rp374.549.487,-	1 Kegiatan	Rp365.808.785,-
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Diadakan	2 Unit	Rp55.117.000,-	2 Unit	Rp55.117.000,-
	2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang di adakan	2 Unit	Rp55.117.000,-	2 Unit	Rp55.117.000,-
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp427.221.760,-	12 Bulan	Rp419.346.600,-
	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tagihan Listrik yang Dibayarkan	12 Bulan	Rp376.421.760,-	12 Bulan	Rp1400.000,-



No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Perubahan		Realisasi s.d Triwulan IV	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Token Listrik dan Air Bersih	12 Bulan	Rp37.200.000,-	12 Bulan	Rp26.544.120,-
	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Rp376.421.760,-	12 Bulan	Rp246.316.320,-
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	Rp44.000.000,-	80%	Rp17.635.500,-
	2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas yang Dibatarkan, BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8 Unit	Rp39.000.000,-	8 Unit	Rp34.985.000,-
	5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelihara	10 Unit	Rp5.000.000,-	10 Unit	Rp. 4.977.000,-
	2	16	01	2.09		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	-	-	-	-
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas/Kemlompok Masyarakat Mitra Startegis Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten		Rp. 1.747.225.900-		Rp1.522.002.067,-



No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Perubahan		Realisasi s.d Triwulan IV	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Layanan Aduan Publik Yang Tersedia	10 Laporan	Rp.0,00,-	10 Laporan	Rp0,00
	2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi Analis Berita dan Pendapat Umum	500 Berita	Rp. 419.060.900,-	500 Berita	Rp358.182.003,-
	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Radio/TV Kabupaten Tana Tidung yang Tersedia	2 Studio	Rp. 289.925.000,-	1 Studi0	Rp. 276.615.000-
	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah data yang Dipublikasikan serta Jumlah Pengunjung yang dilayani melalui PPID	27 OPD	Rp. 458.298.440,-	27 OPD	Rp. 431.005.064,-
	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Serta Jumlah Pembuatan Siaran Pers	20 Media	Rp579.941.560,-	20 Media	Rp456.200.000,-
	2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase Pemanfaatan TIK	80%	Rp3.977.653.825,-		
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Nilai SPBE	1,8	Rp37.000.000,-	1,8	Rp36.075.000,-
	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan Domain	33 OPD	Rp37.000.000,-	20 OPD	Rp36.075.000,-



No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Perubahan		Realisasi s.d Triwulan IV	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,8	Rp4.105.575.825,-	1,8	Rp3.701.151.675
	2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Dokumen	Rp247.594.400,-	1 Dokumen	Rp11.270.000,-
	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang Ditingkatkan Bandwidth dan Akses Internet yang ada Di Kabupaten Tana Tidung	35 OPD	Rp3.857.981.425-	20 OPD	Rp3.689.881.175,-
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			Rp238.130.000,-		Rp178.746.044,-
	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku Kabupaten Dalam Angka	20 Buku	Rp249.120.000,-	20 Buku	Rp218.218.299,-
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Statistik yang Disusun		Rp249.120.000,-		Rp218.218.299,-
	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sinkronisasi Data Statistik Daerah yang Terpublikasikan	33 OPD	Rp249.120.000,-	27 OPD	Rp218,218.299,-
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			Rp450.880.000,-		
	2	21	02			Program Penyelenggaraan	Persentase Perangkat Daerah yang Telah		Rp450.880.000,-		Rp357.863.711-



No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Kerja Perubahan		Realisasi s.d Triwulan IV	
								Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
						Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah				
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan Pemukhtahiran Data Statsitik Sektoral	33 OPD	Rp215.340.000-		Rp188.395.501-
	2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Elektronik	10 OPD	Rp215.340.000,-	10 OPD	Rp188.395.501,-
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sandi untuk Pengamanan Perangkat Daerah	33 OPD	Rp235.540.000,-	33 OPD	Rp169.468.210,-
	2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi	650 Berita	Rp235.540.000,-	650 Berita	Rp169.468.210,-



Berdasarkan tabel 3.2 Evaluasi dan Monitoring Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Program Indeks Kepuasan Masyarakat atau Aparatur

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Atau Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor Anggaran Perubahan senilai Rp6.021.129.536 dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV senilai Rp5.958.611.488. Program ini memiliki beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator output yaitu: Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun, target untuk Tahun 2022 adalah sebanyak 10 Dokumen Anggaran pada Sub Kegiatan ini adalah senilai Rp68.297.400,-. Realisasi hingga triwulan IV adalah sebanyak 10 dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja realisasi keuangan adalah senilai Rp66.252.070,- atau realisasi anggaran dengan tingkat persentase 97% dari seluruh anggaran.
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki dua Sub Kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun Anggaran, Berdasarkan data kepegawaian Jumlah ASN yang ada Pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebanyak 33 orang dan total anggaran yang direncanakan dalam satu tahun adalah senilai Rp4.518.463.205,- dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV adalah Rp4.504.734.765,- dengan tingkat persentase pencairan 97,01% dari total seluruh anggaran untuk sub kegiatan ini. 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator Jumlah ASN yang menerima Honorarium dalam Satu Tahun Anggaran dengan Target selama 12 Bulan, pada Sub Kegiatan ini dianggarkan senilai Rp200.840.000,- dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV adalah senilai Rp200.160.000,- atau dengan tingkat persentase 99,70 % dari total seluruh anggaran pada Sub kegiatan ini.
- C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi indikator pada Sub kegiatan ini adalah: Jumlah PNS yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis dalam Satu Tahun namun sampai dengan Triwulan IV sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena anggaran di akomodir pada Sub Kegiatan lain.
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu : 1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator: Jumlah peralatan kantor yang diadakan dengan target indikator sebanyak 8 unit dan dengan nilai anggaran Rp86.074.276,- dan realisasi hingga triwulan IV adalah sebanyak 8 unit dan realisasi keuangan Rp81.561.000,- atau 94,76% dari total seluruh anggaran pada sub kegiatan ini. 2)



- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator: Jumlah Fasilitas Bahan Logistik Kantor yang diadakan Dalam Satu Tahun dengan target 12 Bulan selama satu tahun anggaran dengan nilai anggaran Rp231.429.128,- dengan realisasi Rp210.559.268,- 3) Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadakan dalam Satu Tahun yaitu sebanyak 2 unit dan realisasi sampai dengan triwulan IV adalah 2 unit Rp15.110.000,- 4) Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator: Jumlah Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan total anggaran Rp374.549.487,- dengan nilai realisasi keuangan hingga Triwulan IV adalah senilai Rp365.808.785,-
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 (Satu) Sub kegiatan yaitu: 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan nilai anggaran Rp55.117.000 dan target sebanyak 2 (Dua) unit Kendaraan Bermotor dan realisasi hingga Triwulan IV adalah sebanyak 2 (Dua) Unit Kendaraan bermotor dengan realisasi hingga triwulan IV adalah senilai Rp55.117.000,-
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Surat Menyurat dengan indikator: Jumlah Materai yang disediakan yaitu sebanyak 100 materai dengan nilai anggaran Rp3.600.000,- dan realisasi hingga triwulan IV adalah sebanyak 100 materai dan realisasi keuangan adalah senilai Rp3.600.000,- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator: Jumlah Token Listrik, air yang disediakan dalam satu tahun dengan target 12 Bulan tersedia fasilitas tersebut dan anggaran pada sub kegiatan ini adalah senilai Rp47.200.000,- dan realisasi 12 bulan, realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV adalah senilai Rp44.293,320,- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator: Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yaitu sebanyak 12 Bulan dengan anggaran senilai Rp376.421.760,- dan realisasi keuangan senilai Rp371.453.280,-
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (Dua) sub Kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan indikator: Jumlah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas yang dibayarkan BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebanyak 10 unit dengan realisasi 8 Unit dan realisasi keuangan senilai Rp34.985.000,- . 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara yaitu dengan target 1 paket dan realisasi 1 (Paket) dan realisasi keuangan senilai Rp4.977.000,-
- 2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik memiliki Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.



A Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan 5 (Lima) sub kegiatan

1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan indikator: Jumlah Layanan Aduan Publik yang Tersedia dengan target pada Tahun 2022 adalah 10 Laporan, anggaran yang direncanakan untuk Tahun 2022 setelah Perubahan adalah senilai Rp0,00 atau digeser ke sub kegiatan lain yang lebih memiliki tingkat urgensi dana untuk pelaksanaannya. Realisasi hingga Triwulan IV adalah sebanyak 10 Laporan.

2) Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Daerah dengan indikator: Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan Pendapat Umum dengan target 500 Berita dengan anggaran Perubahan senilai Rp419.060900,-. Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV adalah senilai Rp358.182.003,- atau dengan tingkat persentase 85,47 dari seluruh total anggaran perubahan pada sub kegiatan ini dan realisasi target indikator adalah 500 berita

3) Pengelolaan Media Komunikasi dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Radio TV Kabupaten Tana Tidung Yang tersedia dengan target indikator adalah sebanyak 2 (Dua) Studio Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung merencanakan Studio Radio dan Studio Podcast dengan total nilai anggaran Perubahan senilai Rp289.925.000,- dan Realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah berfokus pada pengadaan Barang dan Jasa Untuk pengadaan Studio Podcast dengan penyerapan anggaran senilai Rp276.615.00,- atau penyerapan dengan tingkat persentase pencairan adalah 95,41%.

4) Pelayanan Informasi Publik dengan Indikator Jumlah Data yang Dipublikasikan serta jumlah Pengunjung yang Dilayani melalui PPID dengan target sebanyak 27 OPD dengan anggaran Perubahan Tahun 2022 adalah senilai Rp458.298.440,- dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV adalah senilai Rp431.005.064,- atau dengan tingkat persentase 94,04% dan realisasi kinerja sesuai target yaitu 27 OPD.

5) Layanan Hubungan Media dengan indikator: Jumlah Media yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Jumlah Pembuatan Siaran Pers dengan target kerjasama dengan media sebanyak 20 Media dan rencana anggaran Perubahan pada tahun 2022 adalah senilai Rp579.941.560,- dengan berbagai promosi daerah dengan tv lokal dan swasta. Realisasi keuangan dan Kinerja hingga Triwulan IV adalah senilai Rp456.200.000,- dan dengan target 20 Media.

3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan nilai anggaran Perubahan Rp1.747.225.900,- dan realisasi keuangan pada program ini adalah senilai Rp1.522.002.067,- memiliki 2 (Dua) Kegiatan 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (Satu) sub Kegiatan yaitu:

1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator: Jumlah OPD yang Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan Domain dan Sub Domain dengan target 10 OPD pada Tahun 2022 dengan nilai anggaran perubahan Rp37.000.000,-. Realisasi Keuangan hingga



riwulan IV adalah senilai Rp36.075.000,- dan realisasi kinerja sebanyak 10 OPD yang mendaftarkan domain ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

B) Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten dengan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu:

1) Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator: Jumlah Dokumen SPBE yaitu 1 (Satu) Dokumen dengan nilai anggaran perubahan Rp247.594.400,-. Realisasi hingga Triwulan IV adalah senilai Rp11.270.500,- dan Dokumen SPBE belum terealisasi dengan optimal karena peta rencana SPBE akan digunakan sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi, karena sumber daya utama dari SPBE ini adalah Data untuk mendukung performa layanan publik.

2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah dengan nilai pada anggaran Rp3.857.981.425,- dengan indikator: Jumlah OPD yang Ditingkatkan Bandwitch dan Akses Internet yang Terpasang di OPD Kabupaten Tana Tidung dengan target 10 OPD dan realisasi keuangan dan kinerja hingga Triwulan IV adalah senilai Rp3.689.881.175,- dengan realisasi sebanyak 10 OPD.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoralel mengampu 1 (Satu) Kegiatan yaitu: Penyelenggaraan Statistik Sektoralel di Lingkup Pemerintah Daerah

A) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoralel di Lingkup Pemerintah Daerah memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan diseminasi Data Statistik Sektoralel dengan indikator dan target: Sinkronisasi Data Statistik Daerah yang Terpublikasikan target sebanyak 33 OPD nilai anggaran Rp249.120.000,- dan Realisasi keuangan pada Triwulan IV Rp218.218.299,- dengan tingkat penyerapan anggaran 87,60%

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mengampu 2 (Dua) Kegiatan pada program ini yaitu: Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

A) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengampu 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota nilai pada anggaran perubahan adalah Rp215.340.000,- dengan indikator yaitu: Jumlah Sertifikat Elektronik dengan 10 sertifikat. Realisasi keuangan dan kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 senilai Rp188.395.501 anggaran yang terserap 87,49% dan 10 Sertifikat elektronik yang terealisasi

B) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mengampu 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu:

1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota nilai pada anggaran perubahan yaitu Rp235.540.00,- dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang



Manfaatkan Jaringan Komunikasi Sandi target sebanyak 650 Berita. Realisasi hingga Triwulan IV adalah senilai Rp169.468.210,- penyerapan anggaran 71,95%.



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja Pada IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra		Tingkat Capaian		Perangkat Daerah Penganggung	Keterangan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
				6		7		8		1 2		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 *)		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 *)				17		18
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
2	6	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Komunitas/ Kelompok Masyarakat/Mitra Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten	10 Kelompok	Rp. 5.390.573.944	0	Rp. 0	3 Kelompok	Rp. 1.747.225.900	0	Rp. 0	10 Kelompok	Rp. 1.044.831.140	10	Rp. 1.522.002.067	10	Rp. 1.522.002.067	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	6	2.1.0.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																					
1	2	6	2.1.0.2.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Layanan Aduan Publik yang Tersedia	10 Laporan	Rp. 53.630.001	0 Laporan	Rp. 0	10 Laporan	Rp. 0	10 Laporan	Rp. 0	100,00%	0,00%	10 Laporan	Rp. 0	100,00%	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Untuk sub kegiatan ini anggaran murni digeser pada saat perubahan di sub kegiatan lain			
2	2	6	2.1.0.2.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi analisis Berita dan	500 Berita	Rp. 419.060.090	0 Berita	Rp. 0	500 Berita	Rp. 419.060.000	500 Berita	Rp. 279.969.988	100,00%	85,47%	500 Berita	Rp. 358.182.003	100,00%	85,47%	Dinas Komunikasi				
3	2	6	2.1.0.2.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Sarana dan Prasarana Radio/TV Kabupaten Tana Tidung Yang Tersedia	2 Studio	Rp. 504.505.002	0 Studio	Rp. 0	2 Studio	Rp. 289.925.000	1 Studio	Rp. 276.615.000	50,00%	95,41%	1 Studio	Rp. 276.615.000	50,00%	54,83%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Masi dalam On Progress dalam Pengadaan Studio			
4	2	6	2.1.0.2.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Data yang Dipublikasikan serta Jumlah Pengunjung yang dilayani melalui	27 OPD	Rp. 653.971.755	0 OPD	Rp. 0	27 OPD	Rp. 458.298.440	10 OPD	Rp. 211.200.000	100,00%	94,04%	27 OPD	Rp. 431.005.064	100,00%	65,91%	Dinas Komunikasi dan Informatika				
5	2	6	2.1.0.2.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Jumlah Pembuatan Siaran Pers	20 Media	Rp. 2.841.046.272	0 Media	Rp. 0	20 Media	Rp. 579.941.560	3 Media	Rp. 277.046.152	100,00%	78,66%	20 Media	Rp. 456.200.000	100,00%	16,06%	Dinas Komunikasi dan Informatika				
Rata-rata capaian kinerja (%)										60,41	51,21			90	70,72			90	44,45					
Predikat kinerja																								
2	6	3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemanfaatan TIK	100 Persen	Rp. 9.119.968.685	0 Persen	Rp. 0	80 Persen	Rp. 4.142.575	0 Persen	Rp. 3.178.747.108	0 Persen	Rp. 3.784.572.175	0 Persen	Rp. 3.784.572.175	0 Persen			Dinas Komunikasi				
2	6	3	2.1.0.3.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
6	2	6	3.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan Domain dan Sub Domain	33 OPD	Rp. 106.868.562	0 OPD	Rp. 0	10 OPD	Rp. 37.000.000	1 OPD	Rp. 36.075.000	100,00%	97,50%	10 OPD	Rp. 36.075.000	100,00%	33,76%	Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	6	3	2.1.0.3.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
7	2	6	3.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen SPBE	1 Dokumen	Rp. 1.155.284.403	0 Dokumen	Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 247.594.400	1 Dokumen	Rp. 0	100,00%	4,55%	1 Dokumen	Rp. 11.270.500	100,00%	0,98%	Dinas Komunikasi dan Informatika				



8	2	1	0	2	0	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang Ditingkayakan Bandwitch dan Akses Internet yang Terpasang di OPD Kabupaten Tana Tidung	35 OPD	Rp. 8.354.168.946	0 OPD	Rp. 0	10 OPD	Rp. 3.857.981.425	1 OPD	Rp. 3.142.672.108	10 OPD	Rp. 3.737.226.675	100,00 %	96,87 %	10 OPD	Rp. 3.737.226.675	28,57 %	44,73 %	Dinas Komunikasi dan Informatika			
Rata-rata capaian kinerja (%)														40	59,65			100	66,31			52,96	26,49				
Predikat kinerja																											
550	22	62	20	2.2	0	MBSA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024	22 Kabupaten Tana Tidung																	Page			
STATISTIK																											



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja		Target Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja Pada		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra		Tingkat Capaian		Perangkat Daerah Penanggung	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				6		7		8		12		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8)		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6)			
2	2020	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku Kabupaten Dalam Angka	30 Buku	Rp. 1.151.140.003		Rp. 0	30 Buku	Rp. 249.120.000	6	Rp. 44.318.855	33	Rp. 218.218.299	100,00%	87,60%	33	Rp. 218.218.299	100,00%	22,45%	Dinas Komunikasi	
9	2020201	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sinkronisasi Data Statistik Daerah yang Terpublikasikan	33 OPD	Rp. 972.159.002	0 OPD	Rp. 0	33 OPD	Rp. 249.120.000	6 OPD	Rp. 44.318.855	33 OPD	Rp. 218.218.299	100,00%	87,60%	33 OPD	Rp. 218.218.299	100,00%	22,45%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata capaian kinerja (%)										18,18	17,79			100	87,599999			100	22,45		
Predikat kinerja																					
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																			
2	2102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp. 1.190.363.505		Rp. 0	1 Dokumen	Rp. 450.880.000		Rp. 199.666.710		Rp. 357.863.711				Rp. 357.863.711			Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	90 Persentase				50 Persentase													
2	21021	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
1	2102101	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Elektronik	33 OPD	Rp. 322.120.002	0 OPD	Rp. 0	10 OPD	Rp. 215.340.000	2 OPD	Rp. 87.425.689	10 OPD	Rp. 188.395.501	100,00%	87,49%	10 OPD	Rp. 188.395.501	30,30%	58,49%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	2102102	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																			
1	21021021	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Jaring Komunikasi Sandi	750 Berita	Rp. 515.833.500	0 Berita	Rp. 0	650 Berita	Rp. 235.540.000	177 Berita	Rp. 112.241.021	650 Berita	Rp. 169.468.210	100,00%	71,95%	650 Berita	Rp. 169.468.210	86,67%	32,85%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rata-rata capaian kinerja (%)										23,62	44,13			100	79,72			58,48	45,67		
Predikat kinerja																					
X	X																				
X	X																				
X	X																				
X	X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat atau Aparatur Terhadap Pelayanan Kantor	100 Persen	Rp. 39.978.485.440		Rp. 0	100 Persen	Rp. 6.021.125.536		Rp. 1.962.122.764		Rp. 5.801.263.648				Rp. 5.801.263.648			Dinas Komunikasi dan Informatika	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)

Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung adalah pada :

Misi 2 “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yg terpadu tata ruang wilayah”

Misi 6 “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dalam Misi Kepala Daerah adalah :

1. Pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
2. Penyelenggaraan e-government dan pengelolaan domain dalam rangka mendukung Pelayanan Publik Yang Gesit melalui penyediaan layanan-layanan elektronik dan akses internet. Penyediaan layanan elektronik disertai juga dengan pengamanan informasi dan persandian untuk mengantisipasi gangguan keamanan terhadap layanan.
3. Statistik Sektorial dalam rangka mendukung misi Kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui integrasi Satu Data dan optimalisasi Wali Data.

Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran pada misi kepala daerah yaitu:

Misi 2 “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Terpadu Tata Ruang Wilayah”



Tujuan Menyediakan infrastruktur pembangunan yang berkualitas menuju KTT TERANG dan KTT ADA

Sasaran: Meningkatnya jaringan listrik penerangan dan kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi sebagai wujud KTT TERANG”

Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Infrastruktur

Indikator sasaran: Indeks Konektivitas wilayah

Misi 6 “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Tujuan : Meningkatkan implementasi reformasi

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai wujud KTT DIGITAL dan KTT MELAYANI

Indikator Tujuan : Indeks reformasi birokrasi

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat



Tabel 3.1

Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Misi Kabupaten Tana Tidung
2021 – 2026

No	Fungsi DISKOMINFO	MISI KTT	ARAH KEBIJAKAN
1	Pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pembangunan kawasan pemerintahan, penguatan tata kelola kelembagaan dan system pemerintahan dengan perangkat digital dan digitalisasi birokrasi.
2	Penyelenggaraan e-government dan pengelolaan domain dalam rangka mendukung Pelayanan Publik Yang Gesit melalui penyediaan layanan-layanan elektronik dan akses internet. Penyediaan layanan elektronik disertai juga dengan pengamanan informasi dan persandian untuk mengantisipasi gangguan keamanan terhadap layanan.		

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung antara lain:

- a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah;
- b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik;



- c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral;
- d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi Pemerintah.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung antara lain:

- a. Kualitas, kuantitas serta pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
- b. Koordinasi internal dan eksternal belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai

3.2 Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang komunikasi dan informatika. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung adalah: “Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)”. Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tan Tidung Tahun 2021-2026 tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung mendukung dan berkontribusi dalam upaya melaksanakan 2 (dua) misi yaitu:

- Misi ke-2 (kedua) yakni “Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah”. Tujuan dari pelaksanaan misi ke-2 adalah “Menyediakan Infrastruktur pembangunan yang berkualitas menuju KTT TERANG dan KTT ADA”. Dalam upaya mewujudkan dalam bidang Komunikasi dan Informatika, maka sasaran yang harus dipenuhi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sasaran kedua



√Meningkatkan jaringan listrik/penerangan dan kelancaran aksesibilitas perhubungan dan komunikasi sebagai wujud KTT TERANG”.

- Misi ke-6 (keenam) yakni “Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan dari pelaksanaan misi ke-6 adalah “Meningkatkan kualitas layanan public sebagai wujud KTT DIGITAL DAN KTT MELAYANI”. Dalam mewujudkan dalam bidang komunikasi dan informatika , maka sasaran yang harus dipenuhi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sasaran kedua yaitu : “Meningkatkan kualitas layanan public sebagai wujud KTT DIGITAL DAN KTT MELAYANI”.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan system tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima serta keterbukaan informasi publik.



Tujuan Dan Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-		%	30	52,94	53	60	70	80	90	
			Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Infrastruktur Komunikasi	$\frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat yang terbentuk untuk penyebaran informasi terkait kebijakan prioritas}}{\text{Jumlah Total Desa}}$	%	55,0	60	61,11	77,77	88,88	88,88	100	
			Persentase Cakupan Akses Internet	ikisi dan Layanan Informasi Publik	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Terkoneksi Jaringan Telekomunikasi}}{\text{Jumlah Total Desa}} \times 100\%$	Indeks	31	43	60	60	80	85	90	
			Indeks SPBE		Hasil Evaluasi Kemenpan RB Berdasarkan Permen Nomor 59 Tahun 2020	%	1,15	1,15	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	
			Cakupan Pemukhtahiran Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Layanan	Jumlah OPD yang Melakukan Pemukhtahiran Data Statistik Sektoral dibagi Jumlah OPD x100%	Angka	70	70	80	90	100	100	100	
			Capaian Skor Indeks Keamanan Informasi	Pemerintahan Berbasis	Jumlah 5 (Lima) Area Pengamanan Informasi Yaitu: Tata kelola, Aspek Teknologi, Pengelolaan Risiko, Pengelolaan Aset , Kerangka Kerja (Penilaian Indeks KAMI sesuai instrumen BSSN)	Nilai	44	44	175	313	430	536	645	



			Elektro nik																	
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan serta sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

a) Dalam merumuskan program dan kegiatan / sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain:

- ✚ Mempedomani Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tana Tidung serta RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026
- ✚ Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung mendapat tanggung jawab dalam menjalankan misi ke 2 “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Terpadu Tata ruang Wilayah” dengan sasaran Meningkatnya Pengguna sistem informasi daerah, Meningkatnya ayanan Informasi dan Komunikasi Publik, Meningkatnya Integritas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data Serta Infromasi Statistik Daerah, Meningkatnya Informasi Sistem Keamanan Daerah.
- ✚ Pemanfaatan teknologi digital dalam pelksanaan sistem pemerintaha berbasis elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.
- ✚ Pemenihan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terlaksananya Keterbukaan Infromasi Publik. Kemudia mendiseminasikan informasi kebijakan dan program serta peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui berbagai media.



Ketersediaan Informasi yang akurat terkait pertumbuhan potensi sektoral di segala bidang sebagai bahan evaluasi kebutuhan penyelenggaraan pengamanan informasi dan berklasifikasi

- ✚ Indeks KI pada Keamanan Informasi pada Tingkat Provinsi
- ✚ Kedinamisan kemajuan teknologi dibidang komunikasi dan informatika yang selalu berkembang sesuai dengan tuntunan zaman serta pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang sangat pesat sehingga memerlukan peningkatan saran dan prasarana komunikasi dan informatika yang mendukung kemajuan ekonomi di Kabupaten Tana Tidung.



RANCANGAN AWAL 2024						RANCANGAN AWAL 2024 SESUAI KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tana Tidung	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan kantor	100%	Rp 6.860.911.672,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tana Tidung	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan kantor	100%	Rp 6,860,911,672.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang Disusun (Satuan: Dokumen)	10	10,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang Disusun	10	Rp 10.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Tidung	Jumlah Laporan Akhir Tahun (Lakip,LPPD,Calk, Laporan Realisasi (Satuan: Dokumen)	4	Rp10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Tidung	Jumlah DokumenPerubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Rp 10,000,000.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Disusun (Renstra, IKU, Renja, RKT, PK, Cascading, Rencana Aksi, RKT, RKA/DPA)	10	10,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp 10,000,000.00



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Tidung	Persentase Kepuasan ASN Diskominfo Terhadap Pelayanan Kantor (Satuan: Persentase)	100%	240,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Tidung	Persentase Kepuasan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Pelayanan Kantor	100%	Rp 240,000,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan (Satuan: Unit/Buah)	8	50,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 50,000,000.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Tidung	Jumlah Fasilitas Bahan Logistik Kantor yang Diadakan Dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan:Unit)	10	80,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Tidung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 80,000,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Diadakan Dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan: Unit)	2	10,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 10,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Tidung	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi (Satuan:Kegiatan)	1	100,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi S KPD	2 Laporan	Rp 100,000,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tana Tidung	Persentase ASN yang Terpenuhi kesejahteraanya Dalam Satu Tahun	100	Rp6.560.548.896,00	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tana Tidung	Persentase ASN Yang Terpenuhi Kesejahteraanya Dalam Satu Tahun	100%	Rp6.560.548.896,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Tidung	Jumlah ASN Yang Menerima Honorarium Dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan: Bulan)	12	250,000,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp 250,000,000.00



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Tidung	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan: Bulan)	12	Rp6.310.548.896,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Tidung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	Rp6.310.548.896,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Tidung	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Yang Disediakan (Satuan: Persentase)	100	308,000,000.00	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Tidung	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Disediakan	100%	Rp 308,000,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Tidung	Jumlah Materai Yang Disediakan (Satuan: Lembar)	100	3,000,000.00	penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Tidung	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 3,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Tidung	Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik, dan Air Bersih Yang Disediakan (Satuan: Bulan)	12	55,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 55,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tana Tidung	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(Satuan: Bulan)	12	250,000,000.00	Penyediaan Jasa pelayanan Umum	Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 250,000,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Tidung	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara (Satuan: Persentase)	100	40,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Tana Tidung	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100	Rp 40,000,000.00



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tana Tidung	Jumlah Pajak, Kendaraan Dinas yang dibayarkan, BBM, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Satuan: Unit)	8	30,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tana Tidung	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp	30,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Tidung	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara (satuan:Paket)	1	10,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Tidung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp	10,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tana Tidung	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah (Satuan: Orang)	2	30,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Daerah	Tana Tidung	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	10 Orang	Rp	30,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Tidung	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dalam Satu Tahun Anggaran (Satuan: Orang)	2	30,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar Tugas dan Fungsi	Tana Tidung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Rp	30,000,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Tidung	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan (Satuan: Persentase)	Tidak Ada	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tana Tidung	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	0	Rp	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tana Tidung	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan (satuan:Unit)	Tidak Ada	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tana Tidung	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Rp	-

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tana Tidung	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (Satuan: Persentase)	60	Rp 420.600.251,00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tana Tidung	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	60	Rp 420.600.251,00
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Kelompok Masyarakat strategis mitra daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kabupaten.	10	Rp420.600.251,00	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Kelompok Masyarakat Strategis Mitra Daerah Kabupaten yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah	3 Kecamatan	Rp 420.600.251,00
Pelayanan Informasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Data Yang dipublikasikan serta jumlah pengunjung yang dilayani melalui PPID (Satuan: Dokumen/Data)	500	R26.190.244,00	Pelayanan Informasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Komunikasi Publik	2 Dokumen	Rp 26.190.244,00
Pengeleolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Berita/Informasi yang dimuat atau diterbitkan pada media (Satuan:Konten)	500	Rp15.710.000,00	Pengeleolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5 Dokumen	Rp 15.710.000,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Media Yang Bekerjasama dengan Pemda serta Jumlah Pembuatan Siaran Pers (satuan:Media)	20	Rp52.380.001,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Rp 52.380.001,00
Tidak Ada Dalam Rencana Strategis					Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	12 Dokumen	





						Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		
Layanan Hubungan Media	Tana Tidung	Jumlah Media Yang Bekerjasama dengan Pemda serta Jumlah Pembuatan Siaran Pers (satuan:Media)	20	Rp 104.760.000,00	Layanan Hubungan Media	Tana Tidung	Jumlah Layanan Hubungan Media	20 Layanan	Rp	104.760.000,00
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah SDM Yang Mengikuti Bimtek (Satuan:Orang)	1	Rp 26.190.001,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang	Rp	26.190.001,00
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Kebijakan/ Landasan Hukum yang diterbitkan (satuan:Kebijakan)	1	Rp 52.380.001,00	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp	52.380.001,00
Monitorin Opini dan Aspirasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Layanan Aduan Publik yang Tersedia (Satuan: Laporan)	10	Rp13,090,000.00	Monitorin Opini dan Aspirasi Publik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Rp	13.090.001,00
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Tana Tidung	Jumlah Komisi Informasi Daerah Yang terbentuk (Satuan:Dokumen)	1	Rp52.380.001.00	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	1 Dokumen	Rp	52.380.001,00



Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tana Tidung	Jumlah Media dan Kemitraan Komunitas Yang Tersedia	15	Rp26.190.001,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	Rp	26.190.001,00
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tana Tidung	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (IKM) yang terbentuk (Satuan:Kelompok)	1	Rp51.330.001,00	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Rp	51.330.001,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tana Tidung	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang terhubung dengan askes internet yang disediakan oleh Diskominfo	34	Rp961.201.277,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tana Tidung	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang terhubung dengan askes internet yang disediakan oleh Diskominfo	34	Rp	961.201.277,00
	Tana Tidung	Persentase Layanan Publik yang terselenggara secara online atau digital dan terintegrasi	100			Tana Tidung	Persentase Layanan Publik yang terselenggara secara online atau digital dan terintegrasi	100		
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Indeks Nilai Indikator Tata Kelola SPBE	2	Rp18.346.330,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Indeks Nilai Indikator Tata Kelola SPBE	2	Rp	18.346.330,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Hosting Domain dan Sub domain yang dapat dikelola (Satuan:Aplikasi)	2	Rp7.876.330,00	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp	7.876.330,00



Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki portal atau situs web yang sudah didaftarkan	20	Rp10.470.000,00	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Domain	Rp 10.470.000,00
Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2	Rp 157.140.001,00	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2	Rp 157.140.001,00
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik ((satuan: Dokumen)	1	Rp 157.140.001,00	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah	1 Dokumen	Rp 157.140.001,00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tana Tidung	Jumlah OPD yang meningkatkan Bandwith dan akses internet yang terpasang di OPD Kab.Tana Tidung (satuan:OPD)	34	Rp 787.700.001,00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tana Tidung	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	Rp 787.700.001,00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Aplikasi Pemerintah Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	20	Rp 14.945.000,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Aplikasi	Rp 14.945.000,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tana Tidung	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pemukhtahiran data statistik sektoral (satuan: persentase)	92	Rp 130.950.001,00	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tana Tidung	Persentase Perangkat Daerah (Pd) yang Melakukan data Sektoral (Satuan:Persentase)	92%	Rp 130.950.001,00



Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pemuktahiran data statistik (satuan:OPD)	29	Rp 130.950.001,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pemuktahiran data statistik (satuan:OPD)	27 OPD	Rp 130.950.001,00
Pengembangan Infrastruktur	Tana Tidung	Jumlah aplikasi data statistik yang dikelola(satuan:aplikasi)	1	Rp 78.570.000,00	Pengembangan Infrastruktur	Tana Tidung	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Aplikasi	Rp 78.570.000,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun laporan metadata statistik sektoral (satuan: perangkat daerah)	5	Rp 0.00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tana Tidung	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	Rp 0.00
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Tana Tidung	Jumlah SDM Yang Mengikuti peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi (Satuan:Orang)	1	Rp 0,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Tana Tidung	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik	4 Orang	Rp 0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tana Tidung	Jumlah perangkat daerah yang diverifikasi dan dipublikasikan data sektoralnya (Satuan:Perangkat Daerah)	20	Rp 55,500,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tana Tidung	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan dan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	Rp 55,500,000.00



Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tana Tidung	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan informasi perangkat daerah (satuan:Persentase)	10%	Rp 99.520.002,00	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tana Tidung	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan informasi perangkat daerah (satuan:Persentase)	80%	Rp 99.520.002,00
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan informasi perangkat daerah (satuan: perangkat daerah)	2	Rp 52.380.002,00	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi untuk pengamanan informasi perangkat daerah (satuan: perangkat daerah)	34	Rp 52.380.002,00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah permohonan layanan keamanan informasi yang terpenuhi pelayanan (Satuan:pelayanan)	1	Rp 0,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	Rp 0,00
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tana Tidung	Jumlah sistem elektronik yang menerapkan pengamanan informasi aplikasi (satuan:aplikasi)	3	Rp 0,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tana Tidung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp 0,00



Penetapan Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi (Satuan:Kebijakan)	2	Rp 26.190.001,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	3 Kebijakan	Rp 26.190.001,00
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tana Tidung	Jumlah pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi (satuan:Kegiatan)	1	Rp 27,750,000.00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tana Tidung	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 27,750,000.00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah dan pimpinan daerah yang memanfaatkan jaringan komunikasi sandi (satuan: perangkat daerah)	2	Rp 47.140.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah dan pimpinan daerah yang memanfaatkan jaringan komunikasi sandi (satuan: perangkat daerah)	34 Perangkat Daerah	Rp 47.140.000,00
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah dan pimpinan daerah yang memanfaatkan jaringan komunikasi sandi (satuan: perangkat daerah)	2	Rp 47.140.000,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tana Tidung	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	Rp 47.140.000,00



JUMLAH ANGGARAN

Rp
8.800.820.427,00

JUMLAH ANGGARAN

Rp 8.800.820.427,00



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Tana Tidung

Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE REKENING				PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KELUARAN/ KINERJA		INDIKATOR HASIL		ANGGARAN (RP)	SUMBER DANA	
					NAMA KEGIATAN								
1	2				3	4	5		6		7	8	
	2	16			Dinas Komunikasi dan Informatika								
1	2	16	2		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat 100%	100%	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Rp7.188.548.896,00	APBD	
	2	16	01	1:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp10.000.000,00	APBD	
	2	16	01	1:01:01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp10.000.000,00	APBD	
	2	16	01	1:01:03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dokumen	Rp0,00	APBD	



2	16	01	2:06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kabupaten</i>	<i>Indeks Kepuasan ASN Diskominfo terhadap pelayanan kantor.</i>	<i>100%</i>	<i>Indeks Kepuasan ASN Diskominfo terhadap Pelayanan Kantor</i>	<i>100%</i>	<i>Rp240.000.000,00</i>	<i>APBD</i>
2	16	01	2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kabupaten</i>	<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Rp50.000.000,00</i>	<i>APBD</i>
2	16	01	2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Kabupaten</i>	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik kantor Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Rp10.000.</i>	<i>APBD</i>
2	16	01	2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Kabupaten</i>	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>Rp10.000.000,00</i>	<i>APBD</i>
2	16	01	2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kabupaten</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>Rp100.000.000,00</i>	<i>APBD</i>
2	16	01	2.	<i>Administrasi Keuangan Daerah</i>	<i>Kabupaten</i>	<i>Persentase ASN yang Terpenuhi kesejahteraannya Dalam Satu Tahun</i>	<i>100%</i>	<i>Persentase ASN yang Terpenuhi kesejahteraannya Dalam Satu Tahun</i>	<i>100%</i>	<i>Rp6.560.548.896,00</i>	<i>APBD</i>



2	16	01	1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kabupaten	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	40 Orang	Rp6.310.548.896,00	APBD
2	16	01	1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp250.000.000,00	APBD
2	16		2:01:02	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Disediakan	100%	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Disediakan	100%	Rp308.000.000,00	APBD
2	16	3	2:01:03	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kabupaten	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp3.000.000,00	APBD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	Rp55.000.000,00	APBD
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp250.000.000,00	APBD



					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	Rp40.000.000,00	APBD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten	Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Jabatan	5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan Dinas Jabatan yang diPelihara dan Dibayarkan pajaknya	5 Unit	Rp30.000.000,00	APBD
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	15 Unit	Jumlah Perlatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp10.000.00,00	APBD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten	Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek	100%	Persentase ASN yang Mengikuti Bimtek	100%	Rp30.000.000,00	APBD
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 ORang	Rp30.000.000,00	APBD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diadakan	100%	Rp0,00	APBD



					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kabupaten	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp0,00	APBD
	2	16			Bidang Komunikasi dan Kehumasan							
	2	19	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80%	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	80%	Rp443,730,001	APBD
2	2	16	2	2:02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Kelompok Masyarakat Strategis Mitra Daerah Kabupaten yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah	3 Kecamatan	Jumlah Kelompok Masyarakat Strategis Mitra Daerah Kabupaten yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah	3 Kecamatan	Rp443,730,001,00	APBD
	2	16	2	2.06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten	Tersedianya pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	Rp406,760,000,00	APBD



2	16	02	2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Rp15.710.000,00	APBD
2	16	02	2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten	Terlaksananya pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Rp52.380.001,00	APBD
2	16	02	2.01.07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten	Tersedianya Layanan Hubungan Media	1 Layanan	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	R104.780.000,00	APBD
2	16	02	2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaten	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	5 Orang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Orang	Rp26.190.001,00	APBD
2	16	02	2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil, Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp52.380.001,00	APBD



2	16	02	2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Rp13.090.001,00	APBD
2	16	02	2.01.11	Penguatan Tata Kelola komisi Informasi Daerah	Kabupaten	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata kelola Komisi Informasi Di Daerah	1 Dokumen	Rp52.380.001,00	APBD
2	16	02	2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan kemitraan Komunitas	Kabupaten	Terlaksananya kemitraan dengan masyarakat Media dan Komunitas dama Mendiseminasikan informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen2	Rp26.190.001,00	APBD
2	16	02	2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten	Terlaksananya kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil kemitraan dengan Pemangki Kepentingan	2 Dokumen	Rp51.330.001,00	APBD
2	16	02	2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Daerah	Kabupaten	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Inforasi dan penetapan Agenda Prioritas Komuikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp0,00	APBD



2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten	Persentase Pemanfaatan TIK	85%	Persentase Pemanfaatan TIK	85%	Rp961.201.277,00	APBD
2	16	03	2.01	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kabupaten	Indek Nilai Indikator Tata Kelola SPBE	2	Indeks Nilai Indikator Tata Kelola SPBE	2	Rp18.346.330,00	APBD
2	16	03	2.01.02	<i>Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota</i>	Kabupaten	<i>Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	2 <i>Dokumen</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 <i>Dokumen</i>	Rp7.876.330,00	APBD
2	16	03	2.01.01	<i>Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	Kabupaten	<i>Terlaksananya pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	6 <i>Domain</i>	<i>Jumlah Pendaftaran Nama Domain pemerintah Kabupaten/Kota</i>	6 <i>Domain</i>	Rp10.470.000,00	APBD
2	16	03	2:02	Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Kabupaten	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2	Indeks Nilai Domain Tata Kelola SPBE	2	Rp942.854.947,00	APBD
2	16	03	2.02.02	<i>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik</i>	Kabupaten	<i>Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>	1 <i>Dokumen</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	1 <i>Dokumen</i>	Rp157.140.001,00	APBD



						Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota				
	2	16	03	2.02.03	Pengelolaan Pusat Data	Kabupaten	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	2 Unit	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	Rp785.700.001,00	APBD
	2	16	03	2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Aplikasi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Aplikasi	Rp14.945,00	APBD
	2	20			Bidang Statistik dan Persandian							
3	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten	Buku Kabupaten Dalam Angka	20	Buku Kabupaten Dalam Angka	20	Rp130.950.001,00	APBD
	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Statistik yang Dibuat	20	Jumlah Dokumen Data Statistik yang Dibuat	20	Rp130.950.001,00	APBD
	2	20	02	2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten	Berkembangnya Infrastruktur	1 Aplikasi	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Aplikasi	Rp78.570.000,00	APBD
	2	20	02	2.01.08	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	3 Dokumen	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	Rp0,00	APBD



2	20	02	2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 Orang	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 Orang	Rp38.850.000,00	APBD
2	20	02	2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	Rp52.380.001,00	APBD
2	21			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	90%	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	90%	Rp99.520.002,00	APBD
	26	1	2:06:05	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi Untuk Pengamanan Informasi	34 OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi Untuk Pengamanan Informasi	34 OPD	Rp52.380.002,00	APBD
2	21	02	2.01.04	Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten	29 OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan keamanan Informasi	29 OPD	Rp,00	APBD
2	21	02	2.01.01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Jumlah Laporan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp0,00	APBD



2	21	1	2:06:07	Penetapan Kebijakan Tata Kelola keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Ditetapkannya kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi pemerintah Daerah kabupaten/Kota	3 Kebijakan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemeintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	3 Kebijakan	Rp26.190.000,00	APBD
2	21	02	2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemei	1 Laporan	Rp26.190.000,00	APBD
2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat daerah Kabupaten/kota	Kabupaten	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	34 Perangkat Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	34 Perangkat Daerah	Rp47.140.000,00	APBD
2	21	02	2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34 Perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	34 Perangkat Daerah	Rp47.140.000,00	APBD
										Rp8.800.820.427,00	APBD



BAB V

PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari uraian - uraian yang dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

- 1) Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun
- 3) Pagu Dana indikatif total pada Rencana Startegis yang dituangkan pada Rencana Kerja Tahun 2024 senilai Rp8.800.820.427,00

5.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung, diharapkan seluruh perangkat dapat menjabarkan segala kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Sebagai Dokumen Perencanaan, Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya serta langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dan berbagai *Stakeholder* agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.
3. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung.



Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program-program tahunan.

Mengetahui,
Plt, Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Uus Rusmanda, A.Ks.M,HP
197007161192011001
Pembina Utama Muda, IV c